

**DEPUTI BIDANG
PERUNDANG-UNDANGAN**

RENCANA KINERJA TAHUNAN


Unit Eselon I : Deputi Bidang Perundang-undangan
 Tahun : 2013

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
Terselenggaranya izin prakarsa, dan analisa RUU, RPerpu, RPP, penyiapan pertimbangan Rancangan Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP, evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis dan administrasi permasalahan hukum, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, prerogatif, naturalisasi, dan perundang-undangan.	1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, dan pertimbangan RPerpres sesuai dengan standar pelayanan.	100%
	2. Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP yang akan disampaikan/disahkan/ ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar pelayanan.	100%
	3. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan UU, Perpu, dan PP sesuai dengan standar pelayanan.	100%
	4. Persentase penyelesaian penyusunan pendapat hukum atas gugatan dan permohonan hak uji materiil serta permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar pelayanan.	100%
	5. Persentase analisis dan penyelesaian atas permasalahan dan permohonan grasi, amnesti abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, serta naturalisasi sesuai dengan standar pelayanan.	100%

Menteri Sekretaris Negara,

Sudi Silalahi

Jakarta, Januari 2012
 Deputi Bidang Perundang-undangan,


 Muhammad Sapta Murti

